

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang terbagi atas 17.504 pulau kecil dan besar yang membentang pada koordinat 6° Lintang Utara hingga 11° Lintang Selatan serta 92° hingga 142° Bujur Timur. Dengan panjang garis pantai sekitar 95.161 km, yang termasuk salah satu terpanjang di dunia, wilayah Indonesia sebagian besar berupa wilayah perairan dengan luas mencapai sekitar 5,9 juta km². Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selain menyimpan potensi sumber daya kelautan yang melimpah, Indonesia juga memiliki wilayah laut seluas sekitar 6,4 juta km² dengan garis pantai mencapai kurang lebih 108.000 km, sehingga sektor kelautan dan perikanan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian serta kehidupan masyarakat pesisir (KKP, 2024). Namun, realitas sosial-ekonomi menunjukkan bahwa potensi alam tersebut belum diikuti oleh peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Berdasarkan Pusat Statistik (BPS, Februari 2025), terdapat 2,35 juta rumah tangga perikanan tangkap di Indonesia, di mana sekitar 1,82 juta bekerja sebagai nelayan laut aktif. Dari jumlah itu, lebih dari 91,7 persen tergolong nelayan kecil dengan keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar. Kondisi ini mengakibatkan produktivitas dan pendapatan mereka masih rendah dibandingkan sektor lain. Namun, meskipun potensi sumber daya alam (SDA) sangat melimpah, tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan masih tergolong rendah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2025) mencatat dari sisi produksi, total produksi perikanan tangkap laut Indonesia tahun 2024 mencapai 6,72 juta ton, meningkat 3,1 persen dibandingkan tahun 2023. Provinsi Jawa Timur menyumbang sekitar 11,3 persen dari total nasional, menjadikannya salah satu lokasi penghasil ikan tertinggi di Indonesia. Meski demikian, peningkatan volume produksi belum diikuti dengan peningkatan nilai tambah di tingkat nelayan karena lemahnya sistem rantai pasok dan minimnya kelembagaan ekonomi lokal. Wilayah pesisir Indonesia dari sisi potensi, memiliki sumber daya ikan laut yang sangat besar dengan estimasi potensi lestari atau *Maximum Sustainable Yield* (MSY) mencapai 12,01 juta ton per tahun (KKP, 2024). Dengan tingkat pemanfaatan baru sekitar 85 persen. Artinya, masih terdapat ruang pengelolaan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan. Namun, ketimpangan antara potensi sumberdaya alam yang tinggi dengan kesejahteraan nelayan yang rendah menunjukkan adanya *research gap* dalam efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi pesisir.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tak lepas pada nelayan kecil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang kompleks. Menurut Béné (2011), kemiskinan nelayan dijelaskan melalui dua paradigma, yaitu rendahnya pendapatan akibat karakteristik akses terbuka terhadap sumber daya perikanan (*open-access nature of the fisheries*) dan tingginya kerentanan nelayan pada sistem penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood approach*). Kemiskinan nelayan bukan hanya dipengaruhi oleh ketergantungan pada sumber daya perikanan, melainkan juga oleh faktor sosial dan kelembagaan. Dari aspek ekologis, nelayan menghadapi ketidakpastian cuaca, degradasi lingkungan, dan hasil tangkapan yang berfluktuasi. Sementara itu, dari aspek sosial, kemiskinan

dipengaruhi oleh keterbatasan alternatif mata pencaharian, modal, alat tangkap, konflik antarnelayan, ketimpangan kepemilikan aset, lemahnya posisi tawar dalam jaringan pasar, serta praktik *debt patronage relationships* yang menyebabkan rendahnya pendapatan, meskipun mampu mengurangi kerentanan sosial ekonomi (Fitriani *et al.*, 2023). Dengan demikian, kemiskinan nelayan bersifat multidimensional, sedangkan tingkat kesejahteraan tercermin dari kemampuan rumah tangga dalam menguasai dan memanfaatkan aset penghidupan secara optimal.

Nelayan secara historis memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok pekerja pada sektor lainnya. Kondisi tersebut memprihatinkan karena selain semakin terbatasnya wilayah penangkapan ikan, meningkatnya kebutuhan hidup rumah tangga nelayan, menurunnya hasil tangkapan, serta terjadinya praktik penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) yang telah melampaui batas keberlanjutan, ditambah dengan dampak aktivitas manusia dan bencana alam yang mengancam kelestarian lingkungan serta ekosistem perairan, semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi nelayan. Dalam kondisi tersebut, program bantuan sosial pemerintah memiliki peran penting sebagai salah satu alat kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya rumah tangga nelayan kecil.

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, menyelenggarakan berbagai program bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako untuk kebutuhan pokok, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat maupun daerah, serta bantuan subsidi pendidikan dan kesehatan seperti

beasiswa atau layanan kesehatan gratis. Selain itu, terdapat juga program bantuan sosial spesifik seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, bantuan sosial dirancang guna meringankan tekanan pengeluaran masyarakat, meningkatkan taraf hidup, serta mendorong kemandirian ekonomi. Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta rasa aman dan keadilan. Dalam konteks pembangunan nasional, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk hidup layak, mandiri, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020-2024, pembangunan berkelanjutan diintegrasikan melalui pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan). Bansos diposisikan sebagai strategi transisi dari perlindungan sosial menuju pemberdayaan masyarakat, di mana penerima manfaat diharapkan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan produktif. Sementara itu, dalam arah kebijakan RPJMN 2025-2029, fokus diarahkan pada transformasi bansos menjadi bantuan adaptif dan berkelanjutan, yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi perubahan ekonomi dan krisis lingkungan. Dalam konteks pembangunan nasional, bantuan sosial menjadi faktor utama sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) guna menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk di sektor perikanan dan kelautan. Bantuan sosial tersebut memiliki fungsi penting tidak hanya untuk meredam

dampak ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan jangka panjang melalui pemberdayaan dan perlindungan sosial. Efektivitas bantuan sosial menjadi kunci dalam memutus rantai kemiskinan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, terdapat lebih dari 2,3 juta nelayan aktif yang telah terdaftar sebagai penerima berbagai bentuk bansos. Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, peran bansos menjadi semakin strategis seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi global dan dampak sosial dari pandemi COVID-19 yang masih terasa hingga 2024.

Program bantuan sosial di sektor kelautan tidak hanya ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan, melainkan juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan sosial ekonomi pesisir. Melalui pendekatan kesejahteraan berbasis pemberdayaan, bantuan sosial diharapkan dapat menjadi pemicu perubahan perilaku ekonomi rumah tangga nelayan menuju arah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Namun, dampak program ini masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui sejauh mana bantuan tersebut benar-benar berpengaruh terhadap perubahan tingkat kesejahteraan nelayan. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, keberhasilan bansos tidak hanya ditentukan dari penurunan angka kemiskinan, akan tetapi juga dari peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat untuk mandiri. Menurut *World Bank (2025)*, bantuan sosial yang efektif harus bersifat transformatif yakni tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga penerima.

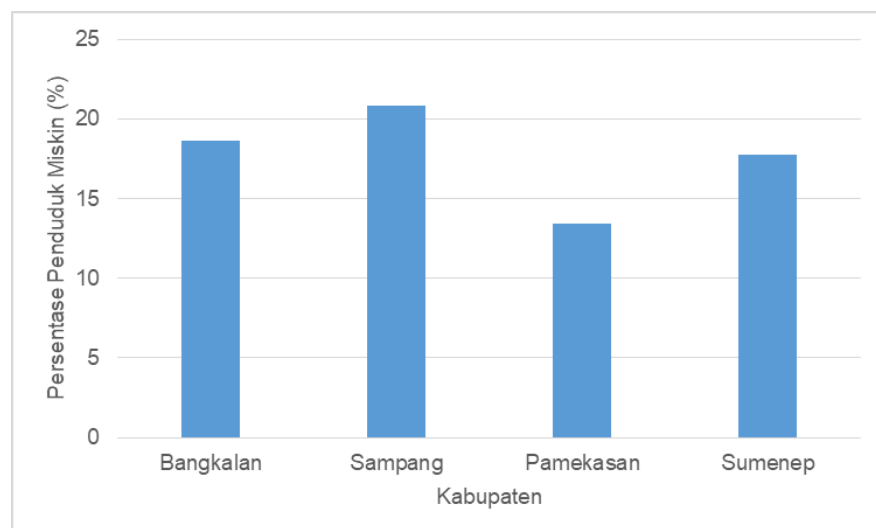
Implementasi *Digital Bansos System (DBS)* sejak akhir 2023 bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana sosial. Laporan

Kementerian Keuangan (2024) menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital berhasil menurunkan potensi kebocoran anggaran hingga Rp1,2 triliun pada tahun fiskal 2024. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan literasi digital masyarakat penerima di daerah tertinggal, yang berdampak pada keterlambatan dan kesalahan input data penerima manfaat. Pengaruh bantuan sosial (bansos) di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah akibat perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan lokal. Laporan Kementerian Sosial (2025), sekitar 18 persen penerima bansos di daerah terpencil belum terverifikasi secara akurat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini mengakibatkan masih adanya kasus bantuan tidak tepat sasaran dan keterlambatan distribusi. Oleh karenanya, diperlukan analisis yang lebih detail terhadap efektivitas bantuan sosial di setiap daerah agar kebijakan sosial yang diterapkan dapat disesuaikan dengan karakteristik lokal dan mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,36 persen. Namun, pada wilayah pesisir Indonesia, angka kemiskinan mencapai 12,41 persen, atau lebih tinggi sekitar 3,05 poin persentase berbeda dengan rata-rata nasional. Disparitas ini mencerminkan bahwa masyarakat di kawasan pesisir masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural, seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur ekonomi, serta minimnya diversifikasi mata pencaharian di luar sektor perikanan tangkap tradisional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan di Indonesia belum berjalan secara merata dan inklusif, terutama bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Ketimpangan ini

juga menegaskan adanya kesenjangan pembangunan wilayah (*regional disparity*), di mana daerah pesisir dan kepulauan masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan dan daratan utama. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih berbasis wilayah dan pemberdayaan masyarakat pesisir agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat dirasakan secara adil oleh semua lapisan masyarakat.

Di Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP Jatim, 2025) melaporkan jumlah pekerja nelayan mencapai 195.820 orang, meningkat sedikit dari tahun sebelumnya. Namun, secara ekonomi kesejahteraan mereka masih belum stabil. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur pada Agustus 2025 tercatat sebesar 102,68, turun dari 104,12 pada Juli 2025 (BPS Jatim, *Berita Resmi Statistik, September 2025*). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan nominal meningkat, beban pengeluaran rumah tangga nelayan juga naik, sehingga daya beli riil cenderung menurun.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2024)

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Per Kabupaten di Pulau Madura 2024

Kabupaten Sampang, yang terletak di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi perikanan laut yang cukup besar. Masyarakat di wilayah pesisir Sampang dominan menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap tradisional, terutama di kecamatan seperti Camplong, Sreseh, Pangarengan, dan Ketapang. Namun, meskipun memiliki sumber daya laut yang melimpah, kondisi sosial-ekonomi nelayan di Sampang masih tergolong rentan dan termarginalkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2024, di Jawa Timur Kabupaten Sampang masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi termasuk tertinggi se Madura, dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,23 persen atau sekitar 194 ribu jiwa. Nilai ini berada jauh di atas rata-rata provinsi yang hanya 9,48 persen. Salah satu faktor utama yang menyumbang pada tingginya angka kemiskinan tersebut adalah kerentanan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan kecil. Ekonomi Kabupaten Sampang tahun 2024 dibanding dengan tahun 2023 tumbuh sebesar 1,71 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Sampang tahun 2024 mayoritas didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,76 persen (BPS Kabupaten Sampang, 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang (2023) menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga nelayan di Sampang berkisar 14.000-15.000, dengan dominasi nelayan kecil tradisional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Profil Kelautan dan Perikanan Jawa Timur 2023 juga mencatat bahwa di Madura, sebagian besar nelayan termasuk kategori nelayan kecil, dengan rata-rata pendapatan di bawah Rp 2 juta per bulan. DKP Provinsi Jawa Timur (2023) menyebut bahwa sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sampang masih didominasi alat tangkap sederhana.

Tabel 1.1 Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang dan Letak Geografi 2024

Kecamatan	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut
Sreseh	4	8
Torjun	-	12
Pangarengan	4	2
Sampang	4	14
Camplong	6	8
Omben	-	20
Kedungdung	-	18
Jrengik	-	14
Tambelangan	-	10
Banyuates	6	14
Robatal	-	9
Karang Penang	-	7
Ketapang	7	7
Sokobanah	5	7
Total	36	150

Sumber : Kabupaten Sampang Dalam Angka (2025)

Salah satu wilayah pesisir yang terletak di Kabupaten sampang adalah Kecamatan Camplong. Kondisi Wilayah Pesisir di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada umumnya hampir sama dengan wilayah pesisir lainnya yaitu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kecamatan Camplong memiliki luas sebesar 69,94 km², merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah desa tepi laut terbanyak di Kabupaten Sampang terdiri dari 14 desa dengan 6 desa pesisir diantaranya Desa Taddan, Banjar Tatela, Tambaan, Dharma Camplong, Sejati dan Dharma Tanjung.

Desa Tambaan dipilih menjadi lokasi penelitian karena termasuk salah satu wilayah pesisir yang memiliki karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang didominasi oleh rumah tangga nelayan. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan tangkap menjadikan struktur ekonomi di desa ini sangat rentan terhadap fluktuasi hasil tangkapan, perubahan musim, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Kondisi tersebut memiliki dampak langsung pada tingkat

pendapatan rumah tangga nelayan yang cenderung tidak stabil, sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap aset produktif dan rendahnya diversifikasi sumber pendapatan semakin memperkuat kerentanan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Tambaan. Oleh karena itu, desa ini menjadi representasi yang relevan untuk mengkaji dampak program perlindungan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) guna meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pemberian dana bantuan dengan syarat untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk miskin dan rentan. Di Kabupaten Sampang, penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) terus diperluas seiring dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir, terutama di kalangan rumah tangga nelayan. Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Sampang tahun terakhir, total penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak tercatat berada di Kecamatan Camplong periode Juli-September 2025 yakni sebanyak 7,972 KPM. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat di Camplong masih mengalami kerentanan ekonomi yang tinggi, terutama akibat ketergantungan terhadap sektor perikanan tangkap yang bersifat musiman. Oleh karena itu, efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Camplong menjadi penting untuk dikaji, guna melihat sejauh mana bantuan sosial tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan di wilayah tersebut. Keterbatasan akses terhadap modal, infrastruktur pelabuhan, fasilitas penyimpanan ikan (*cold storage*), serta lemahnya kelembagaan koperasi nelayan turut memperburuk kesejahteraan mereka. Selain faktor ekonomi, aspek sosial

dan pendidikan juga memainkan peran penting. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sampang hanya 5.8 tahun, terendah di Jawa Timur. Rendahnya pendidikan menyebabkan nelayan sulit mengakses inovasi teknologi perikanan dan program pemberdayaan pemerintah.

Tabel 1.2 Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Sampang 2024-2025

No.	Kecamatan	Desember 2024	Juli-September 2025
1.	Banyuates	2,585	3,258
2.	Camplong	6,212	7,972
3.	Jrengik	1,972	2,461
4.	Karang Penang	3,664	5,236
5.	Omben	4,555	7,002
6.	Pangarengan	1,660	2,029
7.	Sampang	5,085	7,333
8.	Sokobanah	1,217	1,884
9.	Sreseh	2,819	2,994
10.	Torjun	2,594	3,531
11.	Kedungdung	5,157	6,792
12.	Ketapang	1,540	2,433
13.	Robatal	3,272	3,954
14.	Tambelangan	2,570	3,441
	Total	44,902	60,320

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sampang, 2025

Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai menjadi salah satu bentuk program bantuan sosial yang lebih efektif daripada program sejenis di Indonesia. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Owolewa (2017) di Nigeria dan Sudan Selatan yang menunjukkan bahwa bantuan sosial bersyarat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Temuan penelitian menyatakan bahwa bantuan tunai bersyarat berpengaruh signifikan untuk mendorong keluarga penerima bantuan terlepas dari kemiskinan jangka panjang. Evaluasi program membuktikan pelaksanaan yang transparan, didukung sistem bantuan yang berkontribusi dalam mendorong peningkatan tingkat konsumsi rumah tangga

sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta didukung bantuan non-tunai untuk meningkatkan literasi keuangan dan mendorong kemandirian ekonomi (Syahwanes *et al.*, 2025).

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa konsumsi rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat sebesar 10-15 persen daripada kelompok kontrol, terutama pada konsumsi pangan bergizi serta pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Selain itu, tingkat kerawanan pangan menurun sebesar 8-12 persen, yang menegaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berperan terhadap stabilitasi konsumsi rumah tangga miskin, khususnya pada masa krisis ekonomi atau kenaikan harga pangan. Meskipun sekitar 15-20 persen penerima memanfaatkan sebagian bantuan untuk investasi produktif skala kecil, mayoritas dana tetap dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan tujuan utama program (Syahwanes *et.al.*, 2025).

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengaruh bantuan sosial terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat bervariasi di setiap daerah. Perbedaan ini dikarenakan oleh faktor-faktor kontekstual seperti karakteristik sosial ekonomi penerima, jenis bantuan yang diberikan, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal. Beberapa studi menemukan bahwa bantuan sosial mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat secara signifikan, sementara penelitian lain menunjukkan dampak yang terbatas atau bersifat sementara. Ketidakkonsistenan temuan empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*empirical gap*), sehingga diperlukan kajian baru untuk mengukur secara lebih akurat sejauh mana bantuan sosial benar-benar berpengaruh terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Temuan tersebut dipertegas oleh penelitian Syahwanes, *et.al* (2025) “Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Keluarga Miskin; Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak positif dalam mendorong penurunan angka kemiskinan ekstrem, memperluas partisipasi pendidikan anak dari rumah tangga miskin, serta meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala.

Temuan lain oleh Agustin & Sumarsono (2022) “Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur” mengemukakan bahwa bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, pemanfaatan bantuan yang belum optimal, serta kebijakan bantuan sosial pada tahun 2020 yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 sehingga belum secara optimal mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banyak kasus yang terjadi, bantuan sosial hanya bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Studi lapangan oleh Sulfadli *et.al* (2023) “*Impact Program Evaluation : A Case Study of The Hope Family Program in Enrekang Regency*”. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di Desa. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala dalam mewujudkan graduasi mandiri penerima manfaat secara efektif.

Artinya, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Alla efektif dalam memperbaiki kondisi hidup jangka pendek keluarga miskin dengan berhasil meningkatkan kesejahteraan, namun belum efektif dalam menciptakan kemandirian jangka panjang bagi peserta yang artinya belum mencapai tujuan akhir program karena keluarga penerima belum bisa benar-benar mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa meskipun bantuan sosial memberikan dampak langsung, namun pengaruh jangka panjangnya terhadap kesejahteraan masih perlu diteliti lebih dalam.

Kesenjangan hasil tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pendampingan pasca-bantuan, lemahnya literasi keuangan nelayan, serta minimnya akses terhadap sumber pembiayaan produktif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengevaluasi keberadaan program, tetapi juga menganalisis perubahan konkret yang terjadi pada tingkat kesejahteraan nelayan sebelum dan sesudah menerima bantuan sosial pemerintah. Penelitian mengenai pengaruh bantuan sosial terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan menjadi sangat relevan di tengah dinamika ekonomi global yang berdampak pada harga bahan bakar, cuaca ekstrem, dan penurunan hasil tangkapan. Dengan adanya bantuan sosial, diharapkan nelayan memiliki daya tahan ekonomi (*resilience*) yang lebih baik serta dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarganya tanpa harus berutang atau meninggalkan profesinya.

Mayoritas penelitian terdahulu mengenai bantuan sosial pada masyarakat nelayan masih menggunakan pendekatan deskriptif atau korelasional. Pendekatan tersebut mampu menjelaskan kondisi atau hubungan antarvariabel, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjawab pertanyaan kausal, khususnya dalam mengukur efek langsung intervensi program. Keterbatasan ini menimbulkan

kesenjangan penelitian (*research gap*), karena masih sedikit studi empiris yang menguji perbedaan tren kesejahteraan antara kelompok penerima dan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum dan sesudah program berjalan, sebagai dasar validasi klaim dampak program.

Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang menjadi salah satu desa pesisir dengan populasi nelayan yang cukup besar, tetapi tidak semua rumah tangga nelayan dipilih sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena jumlah penerima bantuan ditentukan berdasarkan kuota dan kemampuan anggaran pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program bantuan sosial yang ditujukan untuk penerima tertentu setiap tahunnya, sehingga pemerintah melakukan pembatasan jumlah keluarga penerima manfaat sesuai alokasi dana dalam APBN dan prioritas penanggulangan kemiskinan nasional. Akibatnya, meskipun terdapat banyak rumah tangga nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak semuanya dapat terakomodasi sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga tersedia kelompok pembanding yang relevan secara sosial-ekonomi. Situasi ini memberikan peluang kuat untuk menguji apakah perubahan kesejahteraan yang dialami nelayan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) benar merupakan dampak dari program, bukan akibat dinamika ekonomi lokal yang terjadi secara alami. Dalam konteks evaluasi program, penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan metode *Difference in Differences (DID)* yang membedakan antara kelompok *treatment*, yaitu rumah tangga nelayan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan kelompok kontrol, yaitu rumah tangga nelayan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemilihan kedua kelompok tersebut didasarkan pada prinsip kesebandingan (*comparability*), di mana keduanya berasal dari populasi yang relatif homogen dengan karakteristik sosial ekonomi yang serupa, seperti tingkat pendapatan awal yang rendah, jenis pekerjaan sebagai nelayan, serta kondisi kerentanan ekonomi yang hampir sama. Kesamaan karakteristik ini menjadi penting untuk memastikan bahwa perbedaan perubahan kesejahteraan yang diamati tidak disebabkan oleh perbedaan mendasar antar kelompok, melainkan oleh adanya intervensi Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian, validitas internal penelitian dapat lebih terjaga.

Keberadaan kelompok kontrol dalam penelitian ini menjadi krusial karena memungkinkan dilakukannya perbandingan yang lebih akurat dalam mengukur dampak program. Rumah tangga nelayan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya memiliki kriteria yang tidak jauh berbeda dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), mengingat keterbatasan kuota dan target program yang menyebabkan tidak seluruh rumah tangga miskin dapat menerima bantuan. Kondisi ini menciptakan variasi alami (*natural variation*) dalam penerimaan program di dalam populasi yang sama. Oleh karena itu, membandingkan kelompok penerima dan non-penerima dalam konteks yang serupa memberikan peluang untuk mengidentifikasi dampak riil Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap perubahan kesejahteraan rumah tangga nelayan, sekaligus mengurangi potensi bias yang muncul apabila hanya menggunakan satu kelompok saja. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara empiris dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis melalui penggunaan pendekatan *Difference in Differences (DID)* yang lebih kuat dalam mengidentifikasi hubungan

kausal antara program bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode quasi-eksperimen *Difference-in-Differences (DID)* untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat secara lebih valid. Metode *Difference-in-Differences (DID)* memungkinkan peneliti mengestimasi efek kausal dengan cara membandingkan perubahan indikator kesejahteraan rumah tangga nelayan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (*treatment group*) dan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (*control group*) sebelum dan sesudah program berlangsung, sehingga mampu menangkap kondisi *counterfactual* yaitu perkiraan kondisi yang mungkin terjadi pada penerima jika mereka tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan desain ini, penelitian tidak hanya menguji “ada atau tidaknya perubahan”, tetapi juga menjawab “perubahan itu terjadi karena apa”.

Penelitian ini menggunakan lima indikator utama yang merepresentasikan kondisi sosial ekonomi rumah tangga nelayan secara komprehensif. Pertama, pendapatan rumah tangga mencerminkan kemampuan ekonomi dasar nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang dalam konteks pekerjaan berbasis musim cenderung fluktuatif. Kedua, pengeluaran rumah tangga digunakan sebagai proksi kesejahteraan karena menunjukkan daya beli serta pola pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, tingkat pendidikan menjadi indikator penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia juga peluang mobilitas ekonomi jangka panjang dalam rumah tangga nelayan. Keempat, kesehatan menggambarkan kondisi fisik anggota rumah tangga yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja dan kualitas hidup. Kelima, kepemilikan aset produktif mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam

mengembangkan usaha dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil. Kelima indikator ini dipilih karena mampu menangkap dimensi kesejahteraan secara lebih menyeluruh, serta relevan untuk mengukur sejauh mana Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup rumah tangga nelayan.

Melalui pendekatan empiris berbasis perbandingan dua kelompok, studi ini diharapkan mampu memberikan bukti ilmiah yang sistematis mengenai seberapa besar perbedaan kesejahteraan antara penerima dan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta apakah Program Keluarga Harapan (PKH) mampu dibuktikan sebagai faktor penyebab utama kesejahteraan pada rumah tangga nelayan di wilayah pesisir Sampang.

Penelitian ini secara teoritis memperkuat literatur evaluasi kebijakan sosial dengan mengadopsi kerangka evaluasi dampak berbasis kausalitas dalam tradisi studi ekonomi kelembagaan dan kebijakan publik, di mana program dianalisis sebagai intervensi yang memengaruhi alokasi sumber daya rumah tangga di tengah keterbatasan struktural. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar empiris bagi perumusan kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif, berbasis bukti, dan relevan bagi karakteristik rumah tangga nelayan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah Kemiskinan nelayan masih menjadi persoalan sosial-ekonomi yang serius di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,36 persen. Namun, pada wilayah pesisir Indonesia, angka kemiskinan mencapai 12,41 persen, atau lebih tinggi sekitar 3,05 poin persentase dibandingkan rata-rata

nasional. Pendapatan nelayan yang fluktuatif akibat cuaca, keterbatasan modal, dan akses pasar yang rendah menyebabkan kesejahteraan mereka cenderung stagnan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial reguler Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut bertujuan sebagai jaring pengaman sosial sekaligus instrumen pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Jika dilihat dari penelitian terdahulu efektivitas atau dampak bansos terhadap kesejahteraan masyarakat di setiap daerah berbeda. Sehingga penelitian ini penting untuk menguji “ada atau tidaknya perubahan”, juga menjawab “perubahan itu terjadi karena apa” serta sejauh mana perbedaan perubahan tingkat kesejahteraan antara rumah tangga nelayan penerima dan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum dan sesudah intervensi program, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak kausal terhadap kesejahteraan rumah tangga nelayan di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana perbedaan perubahan tingkat kesejahteraan antara rumah tangga nelayan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum dan sesudah intervensi program di Desa Tambaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Konsisten dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuktikan secara empiris dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Secara khusus, tujuan penelitian ini sebagai berikut.:

1. Menganalisis apakah Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak kausal terhadap kesejahteraan rumah tangga nelayan di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang
2. Menganalisis perbedaan perubahan tingkat kesejahteraan antara rumah tangga nelayan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum dan sesudah intervensi program di Desa Tambaan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teori, atau konsep baru yang memperkaya kajian akademik di bidang tertentu.

Penelitian ini diarahkan agar dapat menjadi salah satu referensi ilmiah yang berkontribusi terhadap pengembangan teori dan kajian di bidang ekonomi pembangunan, dan kebijakan sosial, dengan menghadirkan pendekatan empiris baru untuk mengukur evaluasi dampak bantuan sosial menggunakan analisis kuantitatif *Difference in Differences (DID)*. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya teori tentang kesejahteraan ekonomi, efek redistribusi, teori modal manusia dan efek pemberdayaan. Di samping itu, penelitian ini mampu menjadi referensi untuk memperluas pemahaman tentang indikator kesejahteraan masyarakat nelayan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan aset produktif, sebagai tolak ukur evaluasi kebijakan sosial berbasis data.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian adalah kontribusi nyata dan dapat diterapkan secara langsung untuk memecahkan masalah spesifik di lapangan. Adapaun manfaat praktis dari penelitian ini bagi pemerintah, masyarakat nelayan dan peneliti selanjutnya.

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program bagi Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menilai sejauh mana program bantuan sosial benar-benar efektif meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan bansos produktif yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah pesisir.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi metodologis untuk peneliti lain yang ingin mengkaji evaluasi dampak atau efektivitas kebijakan sosial menggunakan pendekatan kuantitatif yang serupa. Selain itu, penelitian ini membuka ruang untuk eksplorasi lanjutan mengenai faktor-faktor non-ekonomi, seperti sosial budaya dan kelembagaan lokal, yang turut memengaruhi efektivitas bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

c. Bagi Masyarakat Nelayan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat nelayan tentang pentingnya pengelolaan bantuan sosial secara produktif untuk meningkatkan pendapatan, memperluas aset usaha,

dan memperkuat daya beli rumah tangga. Dengan demikian, nelayan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, di sisi lain mampu membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan rumah tangga nelayan serta membandingkan perubahan kondisi antara kelompok penerima dan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum dan sesudah pelaksanaan program. di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Analisis dibatasi pada lima indikator kesejahteraan, yaitu pendapatan, pengeluaran, pendidikan, kesehatan, dan aset produktif, dengan membandingkan kelompok penerima dan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan metode *Difference-in-Differences (DID)*.